

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU
IBU EKSKLUSIF**

(Studi Kasus Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang)

Nanda Kartika Juwitaningrum, Dra. Dyah Hariani, M.M

Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Fax (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Pemerintah Kabupaten Semarang menerbitkan peraturan daerah Kabupaten Semarang nomor 5 tahun 2014 tentang inisiasi menyusui dini dan pemberian air susu ibu eksklusif untuk yakni memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasar berupa ASI Eksklusif dan memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada, namun berdasarkan temuan peneliti, diketahui bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan efektif dan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi serta faktor pendukung sekaligus faktor penghambat dari peraturan daerah Kabupaten Semarang nomor 5 tahun 2014 tentang inisiasi menyusui dini dan pemberian air susu ibu eksklusif di Puskesmas Leyangan kecamatan ungaran timur. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitan, menunjukkan implementasi yang telah dilaksanakan belum optimal, disebabkan semua faktor yang ada seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, hubungan antar organisasi, sikap pelaksana (disposisi implementor), dan kondisi sosial, ekonomi, politik menjadi penghambat bagi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Semarang nomor 5 tahun 2014 tentang inisiasi menyusui dini dan pemberian air susu ibu eksklusif di Puskesmas Leyangan kecamatan ungaran timur.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, ASI Eksklusif, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Hubungan Antar Organisasi

**THE IMPLEMENTATION OF SEMARANG REGENCY'S LOCAL
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 5 YEAR 2014 ABOUT THE
EARLY INITIATION OF BREASTFEEDING AND EXCLUSIVE
BREASTFEEDING**

**(Case Studies in Puskesmas Leyangan East Ungaran District of
Semarang)**

Nanda Kartika Juwitaningrum, Dra. Dyah Hariani, M.M

ABSTRACT

Semarang regency government publish the local government regulation number 5 year 2014 about the early initiation of breastfeeding and exclusive breastfeeding for providing legal protection and opportunities for infants to obtain the basis right of exclusive breast milk and provide legal protection and opportunity for mothers to give breast milk to the baby anywhere, but based on the findings of the researchers, it is known that the implementation of the policy has not been effective and optimum. The purpose of this research is to know and analyze the implementation and the supporting factors also the inhibitory factors of the local government regulations of semarang regency number 5 year 2014 about the early initiation of breastfeeding and exclusive breastfeeding in the Puskesmas Leyangan east Ungaran district of Semarang. This study uses descriptive research types with a qualitative approach. The data collection techniques used are observations, interviews, and documentation. Based on the research's results, showing the implementation that has been implemented was not optimum, because all the factors that exist such as the standards and objectives of policy, resources, the attitude of implementation's agencies, interorganizational communication, the social, economic, political condition and the disposition of implementors become a barrier to the implementation of semarang regency's local government regulation number 5 year 2014 about the early initiation of breastfeeding and exclusive breastfeeding in the Puskesmas Leyangan east Ungaran district of Semarang.

**Keywords : Policy Implementation, Exclusive Breastfeeding, Resources,
The Attitude of Implementation's Agencies, Interorganizational
Communication**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik untuk bayi, terkhusus bayi pada usia 0-6 bulan, yang fungsinya tidak dapat digantikan oleh makanan dan minuman apapun. Salah satu pemenuhan hak bagi setiap ibu dan anak adalah pemberian ASI kepada bayi. Dikutip dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 pengertian Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu, sedangkan pengertian ASI eksklusif menurut peraturan ini adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

Majelis Kesehatan Dunia (WHA), pada tahun 2012, mengesahkan rencana pelaksanaan komprehensif tentang ibu, bayi dan gizi anak muda, yang ditetapkan enam target nutrisi global untuk 2025. Secara singkat kebijakan ini mencakup target untuk meningkatkan setidaknya 50% tingkat pemberian ASI eksklusif dalam enam bulan pertama.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan internasional, nasional dan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang mengenai pentingnya ASI

secara Eksklusif dan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pelaksanaan IMD maka Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Pada Tahun 2018.

Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Semarang termasuk dalam lima kabupaten/kota dengan presentase jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif terendah secara berurutan, lima kabupaten/kota tersebut yakni Kota Salatiga, Kab.Sragen, Kab.Semarang, Kab.Pekalongan dan Kab.Pemalang. Pada tahun 2018 Kabupaten Semarang merupakan wilayah terendah ke 3 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan presentase jumlah bayi yang diberi asi tahun 2018 sebesar 50.73 %.

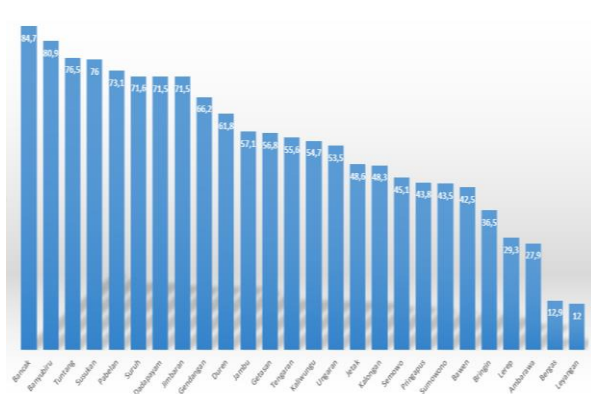
Komitmen pemerintah Kabupaten Semarang terhadap pemenuhan hak ibu dan bayinya terlihat melalui tujuan dibentuknya Perda Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, yang tertera dalam pasal 3 huruf a dan huruf b, yakni memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasar berupa ASI Eksklusif dan memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk

memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada.

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa cakupan pemberian ASI di beberapa Puskesmas di Kabupaten Semarang sudah mencapai 50% keatas, ada 15 Puskesmas yang mencapai 50% keatas seperti Puskesmas Ungaran, Kaliwungu, Tenganan, dan yang paling tinggi yakni Puskesmas Bancak yang mencapai 84,7%, sedangkan 11 Puskesmas yang lain belum mencapai 50%. Puskesmas dengan presentase pemberian ASI paling rendah yakni di Puskesmas Leyangan, yakni hanya mencapai 12%.

Gambar 1.1

Capaian Pemberian ASI Eksklusif Kabupaten Semarang Menurut Puskesmas Tahun 2017



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Semarang Tahun 2017

Adapun indikator yang harus dilaksanakan pada tiap Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah

berpedoman pada sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui :

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan membuat kebijakan peningkatan pemberian air susu ibu tertulis secara rutin dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan
- b. Melakukan pelatihan bagi semua staf dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan menyusui tersebut
- c. Menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan manajemen menyusui
- d. Membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan
- e. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski dipisah dari bayi
- f. Memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis
- g. Menerapkan rawat gawat gabung dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam
- h. Menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi
- i. Tidak memberi dot kepada bayi
- j. Mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui adalah sebuah dasar atau rangkuman dari praktik bersalin yang diperlukan untuk mendukung proses menyusui yang di cetuskan oleh WHO dan UNICEF, kesepuluh langkah ini merupakan prosedur yang harus diterapkan oleh fasilitas yang menyediakan layanan bersalin dan kesehatan bayi. Kementerian kesehatan Republik Indonesia pun dalam hal ini menginstruksikan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia baik pemerintah atau swasta agar menerapkan kesepuluh langkah ini. Kabupaten Semarang sendiri telah memasukkan poin sepuluh langkah di dalam peraturannya yakni pada pasal 20.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif telah diimplementasikan hampir 5 tahun lamanya sejak disahkan pada tahun 2014, dengan adanya Peraturan Daerah tersebut diharapkan efektif untuk meningkatkan kesempatan kepada bayi untuk mendapatkan hak dasar berupa ASI Eksklusif. Tentunya tidak mudah bagi pemerintah Kabupaten Semarang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut.

Dalam implementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini

belum terlalu meningkatkan tingkat pemberian ASI secara signifikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur dan Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur

1.4 Kajian teori

1.4.1 Administrasi Publik

Chandler dan Plano (Yeremias T. Keban, 2008 : 3) mendeskripsikan administrasi publik sebagai proses di mana personel publik dan sumberdaya diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Sedangkan Woodrow Wilson (Wirman Syafri, 2012 : 21) mengemukakan bahwa Administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah adalah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien, dan sejauh mungkin sesuai

dengan selera dan keinginan rakyat. Melalui administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak bisa dipenuhi melalui usaha privat atau swasta.

1.4.2 Kebijakan Publik

James Anderson di dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy Making*" memberi definisi atas kebijakan publik yakni serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan (Agustino, Leo.2006 :7). Lain hal, Thomas R. Dye (Agustino, Leo.2006 :7) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Menurut Budi Winarno (2012 :36) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Evaluasi kebijakan

1.4.3 Implementasi Kebijakan

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983:61) yang disadur

oleh Leo Agustino (2014 : 139) menyatakan makna implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan kebutuhan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Van Meter dan Van Horn memberikan pandangan mengenai definisi implementasi, yakni tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab. 2012 : 135)

1.4.4 Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Indiahono. 2009 :38-39) terdapat tujuh variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Tujuh variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumberdaya
3. Komunikasi antar badan pelaksana
4. Karakteristik badan pelaksana
5. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
6. Sikap pelaksana
7. Kinerja kebijakan

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi (pengamatan) & dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk menguji keabsahan data.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

2.1.1 Kebijakan pemberian ASI yang di komunikasikan kepada petugas

Kabupaten Semarang telah memiliki kebijakan mengenai ASI, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014. Terkait komunikasi yang terjalin antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas Leyangan yakni melalui surat pemberitahuan, pelaporan dan media sosial, kemudian komunikasi yang dilakukan antar petugas kesehatan Puskesmas Leyangan yakni melalui

kegiatan “lokarya mini Puskesmas”, rapat, dan media sosial. Untuk komunikasi kebijakan kepada kelompok sasaran secara tidak langsung dari petugas, dapat berupa ringkasan kebijakan yang ditempel di area Puskesmas, berdasarkan hasil penelitian Puskesmas Leyangan belum mempunyai ringkasan kebijakan terkait peningkatan pemberian ASI Eksklusif yang ditampilkan di semua area fasilitas perawatan kesehatan yang melayani wanita hamil, ibu, bayi, dan / atau anak-anak.

2.1.2 Pelatihan petugas dalam keterampilan penerapan kebijakan

Pelatihan keterampilan dan pemberian pengetahuan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang kepada staf kesehatan Puskesmas Leyangan belum rutin dilakukan, kemudian kuota pelatihan terbatas, belum semua konselor mendapat pelatihan.

2.1.3 Menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui

Pemberian informasi dan penjelasan mengenai manfaat menyusui serta manajemen menyusui kepada ibu hamil di Puskesmas Leyangan sudah dilakukan melalui kegiatan kelas ibu hamil yang dilaksanakan rutin setiap satu bulan sekali, dan konseling yang dilakukan seminggu sekali oleh petugas gizi dan bidan atau pada saat pemeriksaan dan kegiatan ANC,

namun dalam pelaksanaannya masih terhambat dikarenakan belum semua ibu hamil dan menyusui di wilayah kerja Puskesmas Leyangan mengetahui keberadaan kegiatan kelas ibu hamil.

2.1.4 Membantu ibu melakukan inisiasi menyusui dini

Pihak unit kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Leyangan sudah membantu ibu dalam melakukan Inisiasi Menyusui Dini baik secara langsung maupun sekedar pemberian informasi IMD kepada para ibu hamil, namun belum semua ibu hamil mendapat pengetahuan mengenai Inisiasi Menyusui Dini.

Kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan inisiasi menyusui dini pada 60 (enam puluh) menit pertama persalinan adalah adanya persalinan dengan tindakan seperti caesar sehingga kegiatan IMD tidak bisa dilakukan, persalinan dengan cara caesar menimbulkan perasaan risih dan ketidaksabaran yang dimiliki oleh para ibu yang melahirkan, ataupun kendala yang datang dari petugas kesehatan sendiri yakni terkadang petugas lupa untuk melakukan IMD kepada ibu.

2.1.5 Membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meski dipisah dari bayi

Puskesmas Leyangan menyediakan kelas ibu hamil setiap sebulan sekali dan konseling yang dilakukan setiap satu kali dalam seminggu untuk melaksanakan poin ini, kemudian Puskesmas Leyangan memiliki alat peraga untuk menunjang kegiatan ini. Kendala yang dimiliki oleh Puskesmas Leyangan adalah terbatasnya jumlah pegawai yang memberikan konseling, sehingga terkadang pihak Puskesmas tidak melakukan sosialisasi terkait hal tersebut

2.1.6 Memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis

Pihak Dinas Kesehatan telah melakukan himbauan terhadap penerimaan sponsor susu formula pada para konselor di unit-unit pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Semarang, termasuk di dalamnya Puskesmas Leyangan. Petugas kesehatan Puskesmas Leyangan juga sudah menganjurkan kepada para ibu menyusui agar tidak memberikan makanan apapun selain ASI kepada bayi yang berumur 0-6 bulan kecuali ada indikasi medis, anjuran yang dilakukan oleh petugas kesehatan adalah melalui kegiatan ANC, kelas ibu hamil, maupun posyandu.

Beberapa kendala yang didapatkan di dalam pelaksanaan poin ini yakni belum semua ibu hamil dan menyusui menerima informasi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Leyangan, kemudian pendapat para ibu akan kurangnya ASI untuk mencukupi kebutuhan bayi mereka, lalu faktor pekerjaan, dengan ibu bekerja, mereka tidak suka untuk memerah ASI di tempat kerja sehingga mengganti ASI dengan susu formula karena dirasa lebih mudah.

2.1.7 Menerapkan rawat gawat gabung dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam

Pada Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tidak menyediakan rawat gabung, hanya menyediakan pelayanan rawat jalan

2.1.8 Menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi

Petugas kesehatan di Puskesmas Leyangan memiliki pemahaman yang berbeda dari isi pasal 20 huruf h perda no 5 tahun 2014 sekaligus instruksi dari Dinas Kesehatan, yakni petugas kesehatan di Puskesmas Leyangan menginstruksikan para ibu untuk memberikan ASI kepada bayi mereka setiap 2 jam sekali.

2.1.9 Tidak memberi dot kepada bayi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa petugas kesehatan Puskesmas sudah menganjurkan, memberikan penyuluhan, dan menyarankan kepada ibu menyusui di wilayah Leyangan baik melalui konseling maupun pemeriksaan ANC untuk tidak menggunakan dot saat memberikan ASI kepada bayi.

Sebagian besar ibu menyusui di wilayah Leyangan memberikan dot kepada bayinya, salah satunya karena bayi dipisah dengan ibu karena ibu bekerja, selain itu anggapan bahwa dot lebih praktis daripada menggunakan sendok atau gelas, kemudian kemudahan akses para ibu menyusui wilayah Leyangan untuk mendapatkan dot karena masih banyak tempat yang menjual sekaligus memproduksi dot.

2.1.10 Mendorong pembentukan dan merujuk ibu kepada kelompok pendukung menyusui

Pihak Dinas Kabupaten Semarang sudah menghimbau untuk pembentukan kelompok pendukung ASI di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Namun dalam hal ini, di wilayah kerja Puskesmas Leyangan belum terdapat kelompok pendukung ASI, menurut penelitian yang telah dilakukan bahwa mayoritas ibu hamil yang melakukan pemeriksaan atau

konseling di Puskesmas Leyangan belum pernah di dorong untuk membentuk kelompok pendukung, di wilayah Leyangan sudah terdapat kader kesehatan, namun belum ada kader yang ditunjuk khusus untuk peningkatan ASI.

2.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

2.2.1 Ukuran dan tujuan kebijakan

Tujuan kebijakan dari Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini Dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sudah jelas. Ukuran dari kebijakan ini masih belum jelas dikarenakan tidak tercantum di dalam isi Perda Nomor 5 Tahun 2014, ukuran yang ada adalah berupa cakupan pemberian ASI Eksklusif yakni sebesar 50%, ukuran dari kebijakan ini, ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, selaku penanggungjawab program ASI Eksklusif di Kabupaten Semarang, namun ukuran tersebut belum tercatum di dokumen kebijakan.

2.2.2 Sumber daya

Jumlah petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan IMD dan ASI Eksklusif di Puskesmas Leyangan yakni konselor dan petugas gizi masih terlampau kurang jika dibandingkan jumlah

kelompok sasaran yang ada, terkait kompetensi, tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas sudah memenuhi kompetensi yang di butuhkan, dan riwayat pendidikan petugas kesehatan di Puskesmas juga sudah sesuai dengan standar. Sumberdaya dana yang dipergunakan untuk program ASI Eksklusif di Puskesmas Leyangan masih kurang untuk mencukupi operasional kegiatan program ASI Eksklusif, dana yang dialokasikan harus dibagi dengan program lain.

Mengenai sarana Puskesmas Leyangan sudah memfasilitasi para pengunjung dengan adanya ruang laktasi, namun belum dilengkapi oleh fasilitas didalamnya, ruangan ini juga dialihfungsikan menjadi tempat untuk menyimpan barang. Ruangan ini tidak diberi penanda dan berada diluar area inti Puskesmas sehingga pengunjung sulit untuk menemukan lokasi dari ruangan ini.

2.2.3 Karakteristik badan pelaksana

Struktur birokrasi di dalam Puskesmas Leyangan maupun Dinas Kesehatan sudah baik, terdapat bagian yang mengurus program ASI Eksklusif tersendiri yakni bagian gizi, pemegang program ASI Eksklusif di Puskesmas Leyangan nantinya akan memantau dan mengawasi berjalannya program. Mengenai keterbukaan informasi, Puskesmas Leyangan belum memiliki website tersendiri, kemudian sudah disediakan

kotak saran untuk pengunjung yang ingin memberikan kritik dan saran. Mengenai Standar Operasional Prosedur, SOP tidak secara khusus tercantum di dalam Perda.

2.2.4 Hubungan antar organisasi

Koordinasi antara pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dengan Puskesmas Leyangan yang berupa sosialisasi, pemberitahuan, pelatihan, maupun laporan capaian dari Puskesmas ke pihak Dinas Kesehatan sudah dilakukan dengan baik. Namun untuk evaluasi dan monitoring yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang belum dilakukan secara rutin atau kontinu. Mengenai koordinasi Puskesmas dengan pihak Swasta, sudah dilakukan kunjungan lapangan untuk pemfasilitasan ruangan laktasi, namun jika ada pelanggaran belum dapat diberi sanksi.

2.2.5 Sikap pelaksana (Disposisi implementor)

Mengenai pemahaman petugas kesehatan di Puskesmas Leyangan untuk tujuan kebijakan IMD dan ASI Eksklusif tergolong sudah baik walaupun pemahaman tidak mencakup isi atau ketentuan teknis yang ada pada kebijakan IMD dan ASI Eksklusif, petugas kesehatan Puskesmas Leyangan sudah berlaku responsif terhadap kelompok sasaran dalam hal pelayanan maupun pemberian informasi.

2.2.5 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Terkait dengan faktor sosial, masyarakat mendukung adanya program ini, namun untuk dukungan keluarga, di wilayah kerja Puskesmas Leyangan, masih banyak keluarga dari ibu menyusui yang memiliki pemahaman yang kurang tentang ASI Eksklusif, untuk itu dari Dinas Kesehatan sudah mencanangkan program Ayah ASI dan Simbah ASI, namun Puskesmas Leyangan belum menjalankan inovasi dari Dinas Kesehatan tersebut. Terkait faktor kondisi lingkungan ekonomi masyarakat banyak para ibu menyusui yang meninggalkan bayi usia 0-6 bulan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pada saat bekerja para ibu malas/tidak memiliki waktu untuk memerah ASI di tempat mereka bekerja.

Faktor politik mendukung keberhasilan program IMD dan ASI Eksklusif di wilayah kabupaten dengan adanya penegasan kembali yang dilakukan oleh bupati Kabupaten Semarang terkait program ASI Eksklusif serta di lingkup wilayah kerja Puskesmas Leyangan, terdapat dukungan langsung pada tingkat desa dan kelurahan oleh kepala desa.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Puskesmas Leyangan Kecamatan Ungaran Timur belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan optimal.

Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2014 di Puskesmas Leyangan ini masih menemui beberapa kendala, yakni belum sepenuhnya poin 10 langkah keberhasilan menyusui dilaksanakan dengan baik, masih banyak nya ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas Leyangan yang belum menjalankan pemberian ASI Eksklusif dan IMD kepada bayinya. Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik badan pelaksana, Hubungan antar organisasi, Sikap pelaksana (Disposisi implementor), Kondisi sosial, ekonomi dan politik menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat imlementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

3.2 Saran

1. Pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil perlu diketahui oleh masyarakat luas, penginformasian mengenai keberadaan kegiatan tersebut perlu lebih disebarluaskan sehingga para ibu mengetahui keberadaan kelas ibu hamil, kemudian peserta kelas ibu hamil tidak dibatasi kuota

2. Inovasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yakni program Ayah ASI dan Simbah ASI perlu dilaksanakan oleh Puskesmas Leyangan untuk memberikan pemahaman bagi keluarga ibu menyusui, mengingat banyaknya ibu hamil dan menyusui di wilayah kerja Puskesmas Leyangan yang bekerja
3. Perlunya pembentukan kelompok pendukung ASI, karena kelompok ini akan mempermudah petugas kesehatan Puskesmas dalam pelaksanaan program ASI Eksklusif
4. Pencantuman ukuran dari kebijakan sebagai target dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang sehingga unit-unit kesehatan di Kabupaten Semarang mengetahui seberapa besar capaian yang merupakan target dari program ini

IV. Daftar Pustaka

Agustino, Leo.2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

_____.2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

_____.2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, Dan Partisipasi)*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Sosial Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*. Yogyakarta : UII Press.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Kusumanegara, Solahuddin.2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.

Keban, Yeremias T.2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*.Yogyakarta : Gava Media.

Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang (Model-Model Perumusan, Implementasi, Dan Evaluasi)*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2014. *Publik Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan Edisi 5*. Jakarta : : PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani.2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : CV Alfabeta.

Santosa, Panji. 2009. *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung : PT Refika Aditama.

Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan)*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Syafiie, Inu Kencana.2010.*Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman.2012.*Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Syahriani, dan Syakrani.2009.*Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo S.2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin A. 2012. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*.Yogyakarta : Media Pressindo.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS
- Agyemang, Tawiyah. C., Kirkwood, BR.,Edmond. K., Bazzano.A., Hill. Z. Earlyinitiation of breas-feeding in Ghana: barriers and facilitators.(2008). *Journal of Perinatology*, 28, S46-S52. <https://www.nature.com/articles/jp2008173>. (27 Juli 2019)
- Bethany. A., Barbara A . Hawke., Dennison., Hisgen, Stephanie. (2013). Improving Hospital Breastfeeding Policies in New York State : Development of the Model Hospital Breastfeeding Policy. *Breastfeeding Medicine*, 8, 1. DOI: 10.1089/bfm.2012.0030. (27 Juli 2019)
- Grizzard, Tarayn A., Bartick, Melissa., Nikolov, Margaret., Griffin, Beth A., Lee. Kimberly, G. Lee. (2006). Policies and Practices Related to Breastfeeding in Massachusetts: Hospital Implementation of the Ten Steps to Successful Breastfeeding. *Maternal and Child Health Journal*,10,3. DOI: 10.1007/s10995-005-0065-8. (27 Juli 2019)
- Javanparast, Sara., Newman. Lareen., Manis, Linda., McIntyre, Ellen. (2012). Analysis of Breastfeeding Policies and Practices in Childcare Centres in Adelaide, South Australia. *Matern Child Health Journal*, 16 :1276-1283. DOI 10.1007/s10995-011-0887-5. (27 Juli 2019)
- Krik, Sara F.L., Hemmens, Erin., Price, Sheri., Sim, Meaghan.(2012). Lessons Learned from the Implementation of a Provincial Breasfeeding Policy in Nova Scotia, Canada and the Implications for Childhood Obesity Prevention. *International Journal of Environmental Research and Public Health*,9, 1308 1318. DOI:10.3390/ijerph9041308 (27 Juli 2019)
- Senbanjo, Idowu O.,Oshikoya, Kazeem.A.,Ogbera, Okeoghene.A.,Wringht, Kikelomo.O.,Anga, Alexandra.L and Alliance Nutrition Stuffy Group. (2014). Breastfeeding policy and practices at the general paediatric outpatient

clinic of a teaching hospital in Lagos, Nigeria. *International Breastfeeding Journal*,9,10.

<http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/9/1>

/10. (27 Juli 2019)

Artikel :

Family and Reproductive Health Division
Of Child Health And Development
World Health Organization.
Evidence for the Ten Steps to Successful
Breastfeeding.

Link :
https://www.who.int/nutrition/publications/evidence_ten_step_eng.pdf

WHA Global Nutrition Targets 2025 :
Breastfeeding Policy Brief

Link:
https://www.who.int/nutrition/publications/globaltargets2025_policybrief_breastfeeding/en/

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 5 Tahun 2014 *Tentang Inisiasi Menyusu Dini Dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*.

<https://www.depkes.go.id/> diakses pada tanggal 20 Juni 2019

<https://dinkesjatengprov.go.id/> diakses pada tanggal 21 Juni 2019

<https://dkk.semarangkab.go.id/> diakses pada tanggal 21 Juni 2019

<https://www.who.int/> diakses pada tanggal 3 Juli 2019

<http://www.tensteps.org/> diakses pada tanggal 11 Juli 2019